

Implementasi kewenangan otonomi daerah di bidang kehutanan

Fitria Noor, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=95033&lokasi=lokal>

Abstrak

Otonomi Daerah sejak Tahun 2001 diterapkan, dengan perubahan paradigma Pembangunan yang ditujukan kepada penguatan sumber daya lokal, demokratisasi dan kemandirian masyarakat. Kebijakan ini ternyata menimbulkan berbagai permasalahan diseperti penerapannya. Salah satu permasalahan tersebut adalah mengenai Tarik Menarik Kewenangan Di Bidang Perizinan antara Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tulisan ini merupakan analisa sederhana dari hasil penelitian mengenai permasalahan tersebut dengan mengidentifikasi wujud, penyebab dan beberapa implikasi tarik menarik kewenangan tersebut dan pemecahan permasalahan tersebut melalui rekomendasi. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Tulisan ini mencoba menggambarkan secara singkat dari hasil temuan penelitian antara lain mengenai wujudnya adalah Tumpang tindih kewenangan, keridakjelasan kewenangan dan adanya campur tangan Pemerintah Propinsi kepada urusan rumah tangga Kabupaten. Adapun Penyebab dari permasalahan ini antara lain, beragamnya pemahaman desentralisasi pada semua tingkat Pemerintah, tidak adanya kesesuaian antara regulasi otonomi daerah dan teknis serta tidak adanya konsistensi kelengkapan daerah mengenai kewenangan tersebut.

Berdasarkan kondisi empirik: yang terjadi di lapangan friksi mengenai pengaturan kewenangan itu juga dipicu dari kepentingan masing masing itu tentu saja dari keinginan baik (good will) kedua pihak yang bertikai dan di mediasi oleh pemerintah pusat.

Bagian akhir tesis menyampaikan pula analisa sederhana mengenai Good Forestry Governance yang dapat bersinergi dengan Otonomi daerah itu sendiri. Merupakan sumbang pemikiran bagi daerah terhadap berbagai konflik kepentingan yang terjadi sepanjang penerapan otonomi daerah.